

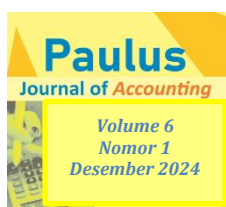
**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PERSEDIAAN IMPOR
(STUDI KASUS PERUSAHAAN MEDIS)**

Aliffia Dewi Syahda¹⁾, Yulianti Raharjo²⁾

¹⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

²⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

aliffiaads@gmail.com



e-ISSN 2715-7474

p-ISSN 2715-9892

Informasi Artikel

Tanggal masuk

19 Oktober 2025

Tanggal revisi

29 Oktober 2025

Tanggal diterima

30 Desember 2025

Kata Kunci:

persediaan, average,

FIFO, akuntansi,

PSAK 202

Abstrak: Penelitian ini membandingkan metode penilaian persediaan average dan FIFO pada Perusahaan X yang bergerak di bidang arthroplasty dan distribusi alat medis. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan data Maret 2025, hasil menunjukkan metode average menghasilkan nilai persediaan akhir dan laba bersih lebih tinggi, serta harga pokok penjualan lebih rendah dibanding FIFO. Perbedaan dipengaruhi fluktuasi kurs rupiah dan dominasi persediaan impor. Metode average dinilai lebih mencerminkan harga terkini, sementara FIFO lebih efisien secara pajak. Penerapan metode telah sesuai PSAK 202.

Abstract: *This study compares the average and FIFO inventory valuation methods at Company X engaged in arthroplasty and medical equipment distribution. Using a descriptive qualitative approach and March 2025 data, results show that the average method produces higher ending inventory and net income, with a lower cost of goods sold than FIFO. Differences arise from exchange rate fluctuations and imported inventories. The average method reflects current costs, while FIFO offers tax efficiency. The applied method complies with PSAK 202.*



PENDAHULUAN

Kemajuan suatu perusahaan, baik di bidang jasa, perdagangan, maupun industri memerlukan adanya pencatatan akuntansi yang baik. Pencatatan ini menjadi dasar untuk menilai performa usaha yang tercermin dalam laporan keuangan. Laporan keuangan berperan penting dalam menunjukkan kondisi perusahaan, apakah sedang dalam kondisi untung atau rugi. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 201 tentang penyajian laporan keuangan, laporan keuangan disajikan secara terstruktur guna memberikan representasi mengenai kondisi keuangan dan hasil usaha suatu entitas. Salah satu unsur yang tercantum dalam laporan keuangan yaitu persediaan.

Menurut PSAK 202 yang mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk persediaan, persediaan mencakup barang yang dibeli dengan tujuan dijual kembali, barang dalam tahap produksi, serta bahan yang dipakai selama proses produksi berlangsung. Oleh karena itu, perusahaan harus mengelola persediaan secara optimal agar dapat menunjang efisiensi operasional dan pencapaian laba perusahaan. Laba diartikan sebagai selisih positif antara pendapatan yang diperoleh dari kegiatan bisnis dan seluruh biaya operasional yang dikeluarkan.

Perusahaan dagang maupun industri biasanya memiliki persediaan yang bervariasi dalam hal jumlah, jenis serta kendala yang dihadapi (Syamsuddin, 2023). Persediaan pada perusahaan industri mencakup bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, dan barang jadi. Persediaan pada perusahaan dagang terdiri dari barang yang siap dijual tanpa melalui

proses pengolahan lebih lanjut. Jika persediaan di perusahaan dagang tidak mencukupi (*stockout*), maka penjualan barang dagang tidak berjalan lancar, sebaliknya, kelebihan persediaan (*overstock*) dapat berujung pada penumpukan yang berisiko menimbulkan kerugian, seperti barang rusak, usang, serta meningkatnya peluang penyimpangan dan pencurian (Debora dkk, 2023).

Perusahaan senantiasa berupaya untuk terus berkembang dan mempertahankan kelangsungan bisnisnya (Syamsuddin, 2023). Oleh karena itu, manajemen perlu merumuskan kebijakan yang mendorong optimalisasi kemampuan serta efisiensi dalam kegiatan bisnis perusahaan. Salah satu strategi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan keuntungan adalah menentukan harga pokok penjualan secara tepat (Suryani & Ardaninggar, 2022). Harga pokok penjualan pada perusahaan dagang merujuk pada biaya barang yang dibeli untuk kemudian dijual kembali (Irham, 2020, p. 102). Harga pokok penjualan pada entitas industri mencerminkan akumulasi biaya produksi atau perolehan yang terkait dengan barang jadi yang telah diserahkan kepada pelanggan dari pemasok.

Metode penilaian persediaan merupakan prosedur akuntansi guna menaksir nilai persediaan yang masih tersedia hingga akhir periode akuntansi (Aisyah dkk, 2025). Nilai persediaan ini akan berdampak pada besarnya harga pokok penjualan serta saldo akhir persediaan dalam laporan keuangan (Rianita, 2021). Pemilihan metode penilaian yang tidak tepat dapat berdampak pada perhitungan biaya atau harga pokok penjualan perusahaan (Sonu & Budiarmo, 2021). Penetapan harga pokok penjualan yang tidak akurat akan memicu ketidaktepatan dalam pelaporan laba perusahaan. Jika jumlah persediaan lebih besar, maka harga pokok penjualan menjadi lebih rendah, sehingga laba kotor dan laba bersih lebih cenderung meningkat, sebaliknya, jika nilai persediaan lebih kecil, harga pokok penjualan akan naik, yang mengakibatkan penurunan laba kotor serta laba bersih.

Berdasarkan PSAK 202, penentuan biaya persediaan hanya boleh menggunakan metode *FIFO* atau metode *average*. Ketentuan ini juga diperkuat dengan Pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa wajib pajak hanya diperbolehkan menggunakan dua metode dalam menilai persediaan dan pemakaiannya untuk keperluan perhitungan harga pokok penjualan, yaitu metode *FIFO* dan *average*.

Perlakuan akuntansi atas persediaan juga mencakup metode pencatatan persediaan sebagai pendekatan dalam mendokumentasikan setiap transaksi masuk dan keluar barang dalam sistem akuntansi. Terdapat dua metode pencatatan yang umum digunakan, yaitu metode perpetual (berkelanjutan) dan metode periodik (berkala). Metode perpetual setiap transaksi pembelian dan penjualan dicatat secara langsung dan *real-time* ke dalam akun persediaan. Metode periodik hanya mencatat nilai persediaan pada akhir periode akuntansi, sehingga memerlukan perhitungan fisik guna menaksir jumlah dan nilai persediaan yang tersisa

Pada penelitian terdahulu, yaitu penelitian Sari (2018) yang berjudul Analisis Perhitungan Persediaan dengan Metode *FIFO* dan *Average* pada PT Harapan menunjukkan bahwa penggunaan metode *average* dinilai lebih tepat dibandingkan *FIFO* dalam perhitungan persediaan. Hal ini karena metode *average* menghasilkan nilai akhir persediaan yang lebih tinggi, harga pokok penjualan yang lebih rendah, serta laba bersih yang lebih besar. Penelitian Sonu & Budiarmo yang dipublikasi pada tahun 2018 dengan judul Penerapan Metode Persediaan dalam Perencanaan Pajak mengungkapkan bahwa metode *FIFO* menghasilkan laba bersih dan beban pajak yang relatif lebih tinggi karena nilai HPP yang lebih rendah, sedangkan, metode *average* dinilai lebih menguntungkan dari sisi efisiensi pajak karena laba yang kecil.

Riset dari Syamsuddin (2023) dengan judul Analisis Perbandingan Perhitungan Harga Pokok Penjualan dengan Persediaan Metode *FIFO* dan *Average* (Studi Kasus pada UD Sumber Makmur Kota Baubau), metode *FIFO* diketahui mampu menekan harga pokok penjualan lebih rendah daripada metode *average*, yang pada akhirnya meningkatkan jumlah laba yang

diperoleh. Hal ini disebabkan perbedaan dalam cara penentuan nilai akhir persediaan, di mana metode *average* menggunakan harga rata-rata satuan, sedangkan *FIFO* mengacu pada harga barang yang pertama kali dibeli. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan metode penilaian harus disesuaikan dengan strategi bisnis masing-masing perusahaan dan lingkungan ekonomi yang dihadapi.

Analisis dalam penelitian ini bertumpu pada data dan informasi yang diperoleh dari Perusahaan X, perusahaan yang bergerak di bidang *arthroplasty* atau penggantian sendi, khususnya sendi panggul (*hip*) dan lutut (*knee*). Perusahaan ini juga berperan sebagai distributor alat kesehatan dengan sumber persediaan yang berasal dari dalam negeri maupun impor, salah satunya dari AAP Joints, produsen implant sendi asal Jerman. Persediaan yang dimiliki digunakan untuk kebutuhan internal perusahaan serta didistribusikan ke sejumlah rumah sakit mitra. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi atas persediaan yang diterapkan oleh Perusahaan X, serta bagaimana perbandingan hasil penilaian antara metode Average dan FIFO terhadap harga pokok penjualan dan laba bersih perusahaan. Penelitian ini juga mempertanyakan sejauh mana metode yang digunakan oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 202 tentang persediaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlakuan akuntansi persediaan pada Perusahaan X serta membandingkan metode Average dan FIFO terhadap harga pokok penjualan dan laba bersih, guna menilai kesesuaiannya dengan ketentuan PSAK 202. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menganalisis data persediaan dan penjualan Perusahaan X periode Maret 2025. Data diperoleh melalui observasi dokumen, wawancara dengan supervisor akuntansi, serta studi pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa metode *Average* menghasilkan harga pokok penjualan lebih rendah dan laba bersih lebih tinggi dibanding *FIFO*.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Akuntansi

Akuntansi mencakup tiga kegiatan, yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan memberikan informasi terkait peristiwa ekonomi yang berlangsung dalam suatu organisasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan data tersebut. Ketika suatu kejadian ekonomi diidentifikasi, organisasi akan mendokumentasikannya secara terstruktur dan urut waktu dalam bentuk satuan moneter. Informasi yang dikumpulkan kemudian disusun menjadi laporan keuangan sebagai sarana komunikasi kepada pengguna informasi akuntansi (Weygandt dkk, 2018).

Pengertian Persediaan

Persediaan adalah salah satu bentuk investasi yang diharapkan memberikan keuntungan melalui penjualannya di masa mendatang (Sonu & Budiarmo, 2021). Menurut (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2024) dalam PSAK 202, persediaan adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Berbagai definisi tersebut menunjukkan bahwa persediaan merupakan aset berupa barang yang dibeli dan disediakan oleh perusahaan, baik untuk dijual kembali, diproses menjadi suatu produk lain, maupun untuk digunakan dalam kegiatan operasional guna memastikan kelancaran bisnis.

Akuntansi Persediaan

Akuntansi persediaan merupakan prosedur pencatatan, pengukuran, dan pelaporan atas transaksi yang berkaitan dengan barang atau material yang dikuasai oleh perusahaan dengan tujuan dialihkan untuk penjualan ulang atau dimanfaatkan dalam kegiatan produksi (Lumenta dkk, 2021). Persediaan dikategorikan sebagai aset lancar karena memiliki manfaat ekonomi jangka pendek dan dapat dikonversi menjadi kas dalam siklus operasi normal perusahaan.

Proses akuntansi persediaan meliputi pencatatan transaksi persediaan, penilaian persediaan, dan pelaporan (Putri dkk, 2022). Pelaporan masalah akuntansi terkait persediaan dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu metode pencatatan dan metode penilaian. Metode pencatatan mencakup pencatatan jumlah barang, aktivitas masuk-keluar, dan saldo persediaan, sementara metode penilaian menentukan nilai persediaan yang tersisa dan biaya yang harus diakui saat penjualan terjadi.

Metode Pencatatan Persediaan

Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual (Rianita, 2021). Metode sistem periodik tidak menyediakan kartu persediaan untuk mencatat transaksi barang dagangan secara rinci sehingga diperlukan perhitungan fisik secara langsung guna mengetahui jumlah dan nilai persediaan pada waktu tertentu. Metode sistem perpetual melakukan pencatatan secara terus-menerus dan *real-time* dengan bantuan sistem komputerisasi, di mana setiap jenis persediaan dicatat dalam kartu tersendiri yang mencerminkan mutasi barang secara aktual.

Perbedaan utama kedua sistem terletak pada frekuensi dan cara pencatatan transaksi persediaan. Metode sistem perpetual mencatat seluruh transaksi yang berkaitan dengan pembelian langsung ke akun persediaan serta harga pokok penjualan saat penjualan. Metode sistem periodik mencatat transaksi pembelian secara terpisah sesuai jenis akun dan tidak mencatat harga pokok penjualan secara langsung saat penjualan terjadi.

Metode Penilaian Persediaan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2024) dalam PSAK 202, metode penilaian persediaan:

1. Metode *FIFO* merupakan pendekatan dalam penilaian persediaan yang menganggap bahwa pengeluaran barang, baik untuk penjualan atau konsumsi pribadi, akan diambil dari barang yang dibeli pertama kali. Nilai persediaan akhir menjadi lebih tinggi dan harga pokok penjualan lebih rendah ketika terjadi inflasi atau kenaikan harga. Hal ini menghasilkan laba kotor yang lebih tinggi.
2. Metode *average* adalah metode penilaian persediaan yang tidak memperhatikan urutan masuk dan keluarnya barang, melainkan menggunakan rata-rata dari seluruh harga perolehan untuk menentukan nilai persediaan. Nilai persediaan akhir yang dihasilkan metode ini berada di antara nilai yang dihasilkan oleh metode *FIFO* dan *LIFO*. Dua jenis pendekatan dalam metode ini, yaitu rata-rata sederhana yang menghitung rata-rata secara keseluruhan, dan rata-rata tertimbang yang mempertimbangkan jumlah unit dalam perhitungan rata-rata.
3. Metode identifikasi khusus adalah metode penilaian persediaan yang mengalokasikan biaya berdasarkan harga perolehan aktual dari setiap unit barang. Biaya dicatat sesuai dengan barang yang terjual maupun yang masih tersisa di akhir periode. Pendekatan ini menelusuri biaya historis secara spesifik untuk tiap unit persediaan. Arus biaya dalam pencatatan disesuaikan langsung dengan arus fisik barang.

Biaya Persediaan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2024) dalam PSAK 202, biaya persediaan mencakup biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang diperlukan agar barang siap digunakan atau dijual. Biaya pembelian meliputi harga barang, bea impor, pajak yang tidak dapat diklaim kembali, ongkos kirim, dan biaya penanganan. Biaya konversi terdiri dari tenaga kerja langsung serta alokasi *overhead* tetap dan variabel, seperti penyusutan, perawatan, dan biaya yang berubah sesuai volume produksi. Biaya lain yang dapat dimasukkan adalah yang diperlukan untuk menempatkan barang dalam kondisi dan lokasi yang diinginkan. Pemborosan

bahan, penyimpanan non-produktif, biaya administrasi umum, dan biaya penjualan harus langsung dibebankan ke beban usaha.

Pengertian Impor

Impor merupakan proses mendatangkan barang ke wilayah Indonesia dari luar negeri, yang dikenai pungutan negara, salah satunya dalam bentuk pajak (Rinaldy dkk, 2021). Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009, sebagai iuran yang diwajibkan oleh undang-undang, pajak harus dibayarkan oleh individu maupun badan kepada pemerintah tanpa menerima balasan secara langsung. Pajak yang dipungut meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22, Bea Cukai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) (Roel dkk, 2023). Pajak-pajak ini dikenakan sebagai upaya pengendalian serta sumber penerimaan negara, sekaligus memengaruhi nilai perolehan persediaan dalam akuntansi. Perusahaan akan menerima PIB (Pemberitahuan Impor Barang), yaitu formulir yang digunakan oleh importir untuk memberitahukan kepada bea cukai terkait barang yang diimpor.

Pajak yang Berhubungan dengan Persediaan Impor

PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas nilai tambah dari setiap tahapan produksi atau distribusi, dan pada akhirnya dibebankan kepada konsumen akhir. Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009, PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), baik yang berasal dari dalam negeri maupun impor. PPN dalam transaksi impor dipungut saat barang masuk ke wilayah Indonesia dan menjadi bagian dari biaya yang harus ditanggung importir. PPN ini dikategorikan sebagai PPN Masukan karena saat pembelian baru dibayarkan, dan dapat dikreditkan dengan PPN Keluaran yang saat penjualan baru dipungut (Mislam dkk, 2023).

Kegiatan impor juga dikenakan PPh Pasal 22 Impor sebagai bentuk pungutan di muka atas penghasilan dari kegiatan impor. Pasal 22 merupakan kewajiban pembayaran angsuran yang dikenakan terkait pengangkutan barang dagangan serta kegiatan impor (Roel dkk, 2023). Tarif sebesar 2,5% dikenakan kepada importir yang memiliki Angka Pengenal Importir (API), sedangkan tarif 7,5% bagi yang tidak memiliki API atau untuk pembelian barang dari lelang (Rahma, 2022). Pajak ini dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai saat barang memasuki wilayah Indonesia.

Bea cukai ialah pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada barang-barang yang masuk atau keluar dari suatu negara. Impor barang tertentu juga dapat dikenai PPnBM sesuai ketentuan dalam UU PPN. PPnBM dikenakan atas barang impor yang dikategorikan mewah dan tidak dapat dikreditkan, sehingga umumnya dibebankan sebagai bagian dari biaya barang (Roel dkk, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai perlakuan akuntansi atas persediaan impor pada Perusahaan X. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan akuntansi dalam penilaian persediaan dengan menghitung harga pokok penjualan dan laba menggunakan metode FIFO dan metode rata-rata, serta dilengkapi dengan kajian atas metode pencatatan perpetual dan kesesuaiannya terhadap PSAK 202. Sampel penelitian ini yaitu data persediaan dan penjualan Perusahaan X Periode Maret 2025.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui data primer dan sekunder. Teknik observasi dan wawancara menjadi alat dalam memperoleh data primer untuk penelitian ini. Observasi dilakukan dengan menganalisis data mentah yang diberikan oleh Perusahaan X, sehingga peneliti dapat memahami kondisi perusahaan berdasarkan dokumen yang tersedia. Wawancara dilakukan dengan supervisor akuntansi yang menangani Perusahaan X. Data

sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan melakukan telaah pustaka terhadap buku, jurnal, dan referensi ilmiah pendukung lainnya yang mendukung teori serta analisis dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan X merupakan organisasi bisnis yang beraktivitas di ranah *arthroplasty* atau penggantian sendi, khususnya sendi panggul (*hip*) dan lutut (*knee*). Perusahaan ini juga berperan sebagai distributor alat kesehatan, berupa implant sendi, dengan sumber persediaan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, salah satunya dari AAP Joints, produsen implant sendi asal Negara Jerman. Persediaan yang dimiliki digunakan untuk kebutuhan internal operasional perusahaan serta didistribusikan ke sejumlah rumah sakit mitra. Berdasarkan hasil wawancara dengan supervisor akuntansi didapatkan informasi bahwa perusahaan telah menggunakan metode penilaian *average* dan metode pencatatan perpetual sejak awal perusahaan berdiri.

“Sejak awal perusahaan berdiri, seluruh hal yang berkaitan dengan laporan keuangan sudah ditangani oleh kami. Metode penilaian persediaan dari awal sudah menerapkan metode average dan untuk pencatatannya menggunakan sistem perpetual. Semua transaksi yang berkaitan dengan pembelian persediaan itu langsung dimasukkan ke akun persediaan peralatan medis dan setiap kali ada penjualan HPP juga dicatat dalam jurnal memorial” (Diana)

Analisis Metode Pencatatan dan Penilaian Persediaan

Perusahaan X menerapkan metode pengakuan persediaan berdasarkan prinsip *Free on Board (FOB) Shipping Point*, yang berarti tanggung jawab penjual atas barang berakhir saat barang dikirim dari lokasi penjual. Barang tersebut dianggap telah menjadi milik Perusahaan X dan dapat langsung diakui dalam laporan posisi keuangan setelah barang telah berada di gudang perusahaan. Pencatatan persediaan Perusahaan X menggunakan metode perpetual, di mana setiap perubahan persediaan dicatat secara langsung dan berkelanjutan. Transaksi pembelian dicatat langsung ke akun persediaan peralatan medis, sedangkan, transaksi penjualan akan langsung disertai pencatatan harga pokok penjualan. Pencatatan transaksi persediaan yang dilakukan oleh Perusahaan X sebagai berikut:

Tabel 1. Pencatatan Transaksi Persediaan Metode Perpetual

No.	Keterangan	Debit	Kredit
1	Pengadaan barang dibayar di muka Kas di bank	436.115.005	436.115.005
	mencatat pembelian persediaan, namun, persediaan belum diakui karena dalam proses pengiriman.		
2	Persediaan peralatan medis Pengadaan barang dibayar di muka	436.115.005	436.115.005
	membalik jurnal 1, di mana barang telah sampai dan persediaan telah diakui.		
3	Persediaan peralatan medis Kas di bank	112.365.655	112.365.655
	mencatat biaya logistik 19.655.000, impor handling 7.500.000 (include PPN 825.000), dan pajak yang berkaitan dengan impor, meliputi PPh 22 11.664.600, bea masuk 22.220.000, dan PPN masukan 51.326.055.		
4	PPN masukan dibayar di muka Persediaan peralatan medis	52.151.055	52.151.055
	mencatat penyesuaian PPN Masukan yang terdapat pada PIB Impor dan PPN impor handling.		

5	Persediaan peralatan medis	18.225.000	
	PPN masukan dibayar di muka	2.004.750	
	Kas di bank		20.229.750
mencatat pembelian persediaan non impor.			
6	HPP – persediaan impor	255.683.067	
	HPP – persediaan non impor	6.561.577	
	Persediaan peralatan medis		262.244.644
mencatat harga pokok penjualan persediaan impor dan non impor.			

Sumber: Diolah Penulis

Penilaian persediaan Perusahaan X menerapkan metode *average*, yang ditunjukkan pada Gambar 3, karena dianggap mampu memberikan nilai yang stabil dan tidak mudah terpengaruh fluktuasi harga. Hal ini sangat membantu dalam menjaga konsistensi nilai persediaan, terutama untuk barang impor yang harganya bisa berubah-ubah akibat perbedaan kurs mata uang asing. Perusahaan X mengakui biaya persediaan sebagai akumulasi dari harga pembelian dan berbagai biaya yang timbul hingga barang diterima di gudang. Pengeluaran barang dari gudang untuk penjualan metode yang digunakan adalah metode *FIFO*.

Komparasi Dua Metode Penilaian Persediaan

Komparasi dilakukan antara metode *average* dengan metode *FIFO* yang telah dihitung dan diolah. Hasil olah data menunjukkan adanya selisih dalam nilai persediaan akhir, harga pokok penjualan, dan laba kotor. Nilai persediaan akhir yang diperoleh melalui metode *average* cenderung lebih besar daripada yang dihasilkan oleh metode *FIFO*. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemilihan metode penilaian persediaan dapat memengaruhi laporan keuangan perusahaan.

LAPORAN PERSEDIAAN METODE AVERAGE																									
Per Maret 2025		964			2.276.678.585			167			521.373.168			103			262.244.644			1.028			2.535.807.109		
Kode	Nama	Stok Awal (28 Februari 2025)			Masuk			Keluar			Stock Akhir														
		Unit	Harga / Unit	Rupiah	Unit	Harga / Unit	Rupiah	Unit	Harga / Unit	Rupiah	Unit	Harga / Unit	Rupiah												
A1101-0	VarioLoc Stem, TP	5	5.171.197	25.855.985	-	-	-	2	5.171.197	10.342.394	3	5.171.197	15.513.591												
A1101-0	VarioLoc Stem, TP	4	5.608.066	22.432.265	2	5.459.722	10.919.445	-	5.558.618	-	6	5.558.618	33.351.710												

Gambar 1. Penilaian Persediaan Metode *Average*

Sumber: Diolah Penulis

LAPORAN PERSEDIAAN METODE FIFO																									
Per Maret 2025		964			2.276.678.585			167			521.373.168			103			263.862.148			1.028			2.534.189.605		
Kode	Nama	Stok Awal (28 Februari 2025)			Masuk			Keluar			Stock Akhir														
		Unit	Harga / Unit	Rupiah	Unit	Harga / Unit	Rupiah	Unit	Harga / Unit	Rupiah	Unit	Harga / Unit	Rupiah												
A1101-C	VarioLoc Stem, TPS	5	5.171.197	25.855.985	-	-	-	2	5.171.197	10.342.394	3	5.171.197	15.513.591												
A1101-C	VarioLoc Stem, TPS	4	5.608.066	22.432.265	2	5.459.722	10.919.445	-	-	-	4	5.608.066	22.432.265												
											2	5.459.722	10.919.445												

Gambar 2. Penilaian Persediaan Metode *FIFO*

Sumber: Diolah Penulis

Perhitungan menggunakan metode *average* yang tertera pada Gambar 1, memberikan estimasi nilai akhir persediaan yang lebih besar daripada yang diperoleh melalui metode *FIFO*. Nilai harga pokok penjualan yang diperoleh melalui metode *average* tercatat lebih rendah daripada metode *FIFO*. Kenaikan dalam harga pokok penjualan berdampak pada menurunnya laba yang dapat diperoleh perusahaan. Pemilihan metode *average* menjadi pilihan yang tepat bagi Perusahaan X apabila fokus utama perusahaan adalah memaksimalkan perolehan laba.

Tabel 2. Perbandingan Metode *Average* dan *FIFO*

	<i>Average</i>	<i>FIFO</i>
Penjualan	548.787.024	548.787.024
Persediaan awal	2.276.678.585	2.276.678.585
Pembelian bersih	521.373.168	521.373.168
Barang tersedia untuk dijual	2.798.051.753	2.798.051.753
Persediaan akhir	2.535.807.109	2.534.189.605
Harga pokok penjualan	262.244.644	263.862.148
Laba (rugi) kotor	286.542.380	284.924.876
Beban operasional	(210.226.958)	(210.226.958)
Laba (rugi) usaha	76.315.422	74.697.918
Beban non operasional	(9.559.253)	(9.559.253)
Laba (rugi) bersih	66.756.169	65.138.665

Sumber: Diolah Penulis

Penelitian ini menghasilkan data yang menunjukkan inkonsistensi dengan sejumlah temuan dari studi sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah (2025) dan Syamsuddin (2023) menyatakan bahwa penggunaan metode *average* menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih besar dibandingkan metode *FIFO*. Metode *FIFO* dinilai mampu memberikan laba yang lebih tinggi, namun, hasil dalam studi ini menunjukkan hal yang sebaliknya, yaitu metode *average* justru menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih rendah serta laba kotor yang lebih besar dibandingkan metode *FIFO*.

Perbedaan tersebut dipicu oleh adanya tekanan inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah di awal tahun, yang menyebabkan harga barang mengalami peningkatan. Mengingat sebagian besar persediaan pada Perusahaan X berasal dari luar negeri, struktur harga yang

terbentuk menjadikan metode *FIFO* mencatat harga pokok penjualan yang sedikit lebih tinggi dibanding metode *average*. Perusahaan X secara konsisten menerapkan metode *average*, sehingga harga pokok barang yang dicatat pada awal periode penelitian cenderung berada pada tingkat yang lebih tinggi.

Studi ini menunjukkan kesamaan hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2018), bahwa metode *average* menghasilkan nilai akhir persediaan yang lebih tinggi, harga pokok penjualan yang lebih rendah, serta laba bersih yang lebih besar dibandingkan dengan metode *FIFO*. Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa penggunaan metode *average* dalam penilaian persediaan memberikan laba bersih yang lebih besar. Penggunaan metode *FIFO* mendukung efisiensi pajak, sebab memberikan laba bersih yang lebih rendah. Temuan ini diperkuat oleh penelitian dari (Sonu & Budiarso, 2021), yang mengemukakan bahwa semakin rendah margin laba, menyebabkan perusahaan membayar pajak dalam jumlah yang lebih kecil.

Kesesuaian dengan PSAK 202

PSAK 202 pada paragraf 10 menyatakan bahwa komponen biaya persediaan mencakup seluruh pengeluaran yang terjadi hingga persediaan berada dalam kondisi dan lokasi yang siap digunakan atau dijual. Komponen ini meliputi biaya pembelian, biaya konversi, serta biaya lainnya yang berkaitan langsung dengan proses perolehan. Biaya pembelian sendiri mencakup harga pokok barang, bea masuk, jenis pajak tertentu, ongkos pengangkutan, biaya penanganan, serta pengeluaran lain yang secara langsung berkaitan dengan perolehan barang jadi, bahan baku, atau jasa. Perusahaan X telah mengidentifikasi dan mengalokasikan seluruh jenis biaya tersebut dengan tepat.

Tabel 3. Biaya Persediaan Perusahaan X

Keterangan	Kategori	Debit	Kredit
Pembelian implan	Harga beli	-	436.115.005
PIB impor implan PO 14	Bea impor dan pajak lainnya	-	85.210.655
Biaya logistik implan	Biaya pengangkutan	-	18.880.000
<i>Custom clearance</i> implan	Biaya penanganan	-	6.818.563
KAI logistik	Biaya pengangkutan	-	775.000
Impor <i>handling</i>	Biaya penanganan	-	7.500.000

Sumber: Diolah Penulis

Terkait pajak lainnya, Perusahaan hanya mengakui bea masuk dan PPh 22 atas Impor sebagai biaya persediaan. PPN Impor dan PPN Masukan (jika ada) dikeluarkan dari biaya pembelian persediaan. Komponen pajak PPN Masukan tidak dimasukkan ke dalam nilai persediaan karena harus dicatat tersendiri. Oleh sebab itu, perusahaan melakukan penyesuaian melalui jurnal memorial untuk memisahkan komponen pajak dari nilai persediaan. Hal ini ditunjukkan pada perhitungan Tabel 4, perubahan kurs dari Rp17.185 menjadi Rp19.854 menunjukkan adanya penambahan biaya pada persediaan impor hingga barang tersebut dapat sampai ke gudang dan diakui sebagai aset.

Tabel 4. Penyesuaian Biaya Persediaan Impor

Harga persediaan dalam Euro	25.343
Kurs awal	17.185
Rupiah yang dikeluarkan untuk pembelian persediaan	436.115.005
Biaya yang berkaitan dengan persediaan:	
Biaya logistik	18.880.000
PIB Impor	85.210.655

<i>Custom clearance</i>	6.818.563	
Kalog JKT-SBY	775.000	
<i>Impor handling</i>	7.500.000	119.184.218
Biaya yang harus dipisahkan dari biaya persediaan:		
PPN Impor	51.326.055	
PPN <i>Impor handling</i>	825.000	(52.151.055)
Total biaya persediaan		503.148.168
Kurs akhir (503.148.168/25.343)	19.854	

Sumber: Diolah Penulis

PSAK 202 Paragraf 25 menyebutkan bahwa perhitungan biaya persediaan dilakukan dengan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP) atau metode rata-rata tertimbang. Perusahaan X telah mematuhi ketentuan tersebut dengan tidak menggunakan metode LIFO, yang tidak diperkenankan dalam PSAK, dan memilih untuk menerapkan metode *average* dalam menentukan biaya persediaannya. Pemilihan metode ini mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Implementasi metode *average* ini dapat dilihat melalui perhitungan yang disajikan pada Gambar 3.

Stok Awal (28 Februari 2025)			Masuk			Keluar			Stock Akhir		
Unit	Harga / Unit	Rupiah	Unit	Harga / Unit	Rupiah	Unit	Harga / Unit	Rupiah	Unit	Harga / Unit	Rupiah
25	1.232.634	30.815.840	10	1.191.212	11.912.122	4	=('Lap Stock'!\$H27+'Lap Stock'!\$K27)/('Lap Stock'!\$F27+'Lap Stock'!\$I27)				
17	1.218.691	20.717.742	5	1.191.212	5.956.061	5					
6	1.592.775	9.556.652	-	-	-	1	1.592.775	1.592.775	5	1.592.775	7.963
13	1.611.746	20.952.696	6	1.548.576	9.291.455	4	1.591.797	6.367.190	15	1.591.797	23.876

Gambar 3. Perhitungan Metode Average

Sumber: Diolah Penulis

Perhitungan biaya tiap persediaan dilakukan dengan cara merata-ratakan jumlah persediaan awal dan pembelian atau produksi selama periode berjalan. Pada Gambar 3 ditunjukkan rumus perhitungan dalam Excel, di mana lap stock H27 menunjukkan nilai saldo awal persediaan, sedangkan lap stock K27 mencerminkan total pembelian selama periode tersebut. Jumlah ini kemudian dibagi dengan lap stock F27 yang menunjukkan jumlah unit persediaan awal, ditambah lap stock I27 yang merupakan jumlah unit yang dibeli. Proses menghitung nilai rata-rata dapat dilakukan pada akhir periode tertentu atau setiap kali barang diterima, tergantung pada kebutuhan operasional dan aturan internal perusahaan.

PSAK 202 Paragraf 34 menyatakan bahwa nilai persediaan yang telah dijual harus dicatat sebagai beban pada periode yang sama dengan pencatatan pendapatan dari penjualan tersebut. Perusahaan X, yang menggunakan metode pencatatan perpetual, secara otomatis mencatat harga pokok penjualan setiap kali terjadi transaksi penjualan. Dengan demikian, jumlah persediaan akan langsung dikurangi, dan beban atas persediaan akan dicatat secara real-time. Praktik ini tercermin dalam pencatatan transaksi yang ditampilkan pada Tabel 1 dan menunjukkan bahwa Perusahaan X telah menerapkan prinsip pengakuan beban sesuai dengan ketentuan PSAK 202.

PSAK 202 Paragraf 36 mengatur mengenai pengungkapan informasi yang relevan terkait persediaan dalam laporan keuangan. Poin yang sesuai dan telah diterapkan oleh perusahaan diantaranya adalah poin (a), yaitu penjabaran atas prinsip akuntansi yang dipilih untuk menilai persediaan. Perusahaan telah memenuhi ketentuan ini dengan mencantumkan kebijakan tersebut secara rinci pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dalam CALK, dijelaskan bahwa perusahaan menggunakan metode perpetual dengan penilaian persediaan berdasarkan metode *average*.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024 <i>(Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)</i>	
i. Persediaan	
Persediaan dinyatakan dengan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Penilaian persediaan ditentukan berdasarkan metode rata - rata (<i>average</i>) . Nilai realisasi bersih ditentukan sebesar harga jual dikurangi dengan biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Entitas mengakui kerugian penurunan nilai ketika nilai realisasi bersih lebih rendah daripada biaya perolehan membentuk penyisihan untuk penurunan nilai persediaan.	

Gambar 4. Penyajian Persediaan pada Catatan Atas Laporan Keuangan Perusahaan X
Sumber: Data Penelitian

Paragraf 36 poin (b) mengatur bahwa entitas harus mengungkapkan jumlah persediaan berdasarkan klasifikasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelaporan entitas tersebut. Tujuannya adalah agar informasi mengenai persediaan dapat disajikan secara jelas, transparan, dan relevan bagi para pengguna laporan keuangan. Perusahaan telah menerapkan ketentuan ini dengan mencantumkan jumlah persediaan dan mengklasifikasikannya sebagai aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Pengelompokan ini mencerminkan bahwa persediaan diharapkan dapat digunakan atau dijual. Bukti dari pernyataan tersebut terlihat pada Gambar 5 dalam laporan posisi keuangan, di mana informasi tentang persediaan disajikan secara eksplisit sebagai bagian dari total aset lancar perusahaan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024 (Dalam Rupiah)			
A S E T	<i>Cttn</i>	2025	2024
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	<i>2f, 1&2</i>	278.099.288	219.119.284
Piutang	<i>2h, 3</i>	969.973.435	484.908.068
Persediaan	<i>2i, 4</i>	2.535.807.109	2.851.224.292
Pajak Dibayar di Muka	<i>5</i>	64.116.092	76.341.258
Beban Dibayar di Muka	<i>2j, 6</i>	133.250.000	147.500.000
Jumlah Aset Lancar		3.981.245.924	3.779.092.901

Gambar 5. Penyajian Persediaan pada Laporan Posisi Keuangan Perusahaan X
Sumber: Data Penelitian

Paragraf 36 poin (d) menyatakan bahwa jumlah persediaan harus diakui sebagai beban pada periode ketika persediaan tersebut dikonsumsi atau dijual. Nilai persediaan akan dibebankan ke laporan laba rugi sebagai beban pokok penjualan pada saat barang tersebut digunakan dalam proses produksi atau dijual kepada pelanggan. Perusahaan telah mengungkapkan informasi ini dalam laporan laba rugi, yang menunjukkan bahwa beban atas persediaan telah dicatat sesuai periode terjadinya transaksi.

LAPORAN LABA RUGI			
Per 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024			
(Dalam Rupiah)			
Cttn	2025 MARET	2025	2024
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Penjualan Barang	421.287.024	1.607.025.238	5.530.629.775
Penjualan Barang - Non PPN	127.500.000	174.000.000	441.500.000
TOTAL PENDAPATAN	548.787.024	1.781.025.238	5.972.129.775
BIAYA ATAS PENDAPATAN			
HARGA POKOK PENJUALAN			
Harga Pokok Penjualan Produk	255.683.067	814.643.060	2.528.596.856
Harga Pokok Penjualan (Bone Cement)	6.561.577	21.874.166	51.965.793
TOTAL BIAYA ATAS PENDAPATAN	262.244.644	1.150.484.549	3.662.260.346
LABA (RUGI) KOTOR	286.542.380	630.540.689	2.309.869.429

Gambar 6. Penyajian Harga Pokok Penjualan Laporan Laba Rugi Perusahaan X

Sumber: Data Penelitian

SIMPULAN

Perusahaan X menerapkan metode penilaian persediaan average secara konsisten sejak awal berdiri. Penerapan metode ini dinilai mampu menjaga stabilitas nilai persediaan, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga akibat perubahan kurs pada barang impor. Pencatatan persediaan dilakukan dengan metode perpetual, sehingga setiap transaksi pembelian dan penjualan langsung dicatat ke dalam akun persediaan serta harga pokok penjualan. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode average menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih rendah dan laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan metode FIFO. Perbedaan ini disebabkan oleh kondisi inflasi serta pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi pada awal tahun. Metode average dapat menjadi pilihan yang tepat ketika perusahaan fokus pada peningkatan laba, sementara metode FIFO lebih cocok digunakan untuk efisiensi beban pajak karena menghasilkan laba yang lebih rendah. Penerapan kebijakan akuntansi persediaan oleh Perusahaan X telah sesuai dengan ketentuan PSAK 202, baik dari aspek pengakuan, pengukuran, pencatatan, hingga pengungkapan. Pengelompokan biaya yang masuk dalam perolehan persediaan juga telah dilakukan dengan tepat, serta pengungkapan informasi yang relevan telah disampaikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Kepatuhan terhadap PSAK 202 mencerminkan tanggung jawab perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan yang andal dan transparan.

Saran bagi perusahaan adalah untuk mempertahankan penerapan metode average jika strategi utama perusahaan adalah meningkatkan laba, namun, perusahaan juga perlu melakukan simulasi perbandingan metode secara periodik, agar dapat menyesuaikan metode penilaian persediaan dengan kondisi ekonomi dan strategi keuangan yang sedang dijalankan. Kontribusi dari temuan ini memberikan gambaran bahwa pemilihan metode penilaian persediaan memiliki dampak terhadap laba bersih, sehingga menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajerial. Keterbatasan yang masih dihadapi perusahaan adalah sistem pencatatan persediaan yang masih dilakukan secara manual melalui Excel, sehingga berisiko terhadap kesalahan input data dan memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses rekonsiliasi. Oleh karena itu, disarankan agar perusahaan mulai mempertimbangkan digitalisasi sistem pencatatan melalui penggunaan software akuntansi yang terintegrasi, guna meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan transaksi persediaan.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, N., Hasyim, S., & Idris, H. (2025). Analisis Perbandingan Metode Penilaian Persediaan Fifo Dan Average Terhadap Laba Kotor Perusahaan Pt Salmart Retailindo

- Internasional. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 06, 1–5.
- Debora, M., Febriati, & Kristiawati, E. (2023). Analisis Sistem Pengendalian Persediaan Barang Dagang Pada PD. Asia Agung Pontianak. *Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Investasi (JAADI)*, 3(2), 1–6.
- Irham, F. (2020). *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta.
- Lumenta, C. P., Morasa, J., & Pinatik, S. (2021). Akuntansi Persediaan Barang Atau Perlengkapan Berdasarkan PSAP Nomor 05 Pada Kantor Kepolisian Resor Bolang Mongondow Selatan. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(1), 146–154.
- Mislam, Nuridah, S., & Rosida, S. A. (2023). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pembelian Dan Penjualan Barang Sebelum Dan Sesudah Pandemi Pada Pt.Seah Precision Metal Indonesia Tahun 2019-2022. *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, 1(3), 218–232. <https://doi.org/10.59841/excellence.v1i3.366>
- Putri, A. U., Meiriasari, V., Djuita, P., & Pratama, M. S. (2022). Analisis Penerapan Pencatatan Dan Penilaian Persediaan Barang Dagang Menurut Psak No 14 Pada Cv Dandy Brothers Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 13(1), 17–22. <https://doi.org/10.36982/jiegm.v13i1.2227>
- Rahma, A. A. (2022). PPh 22 Reporting On Import Activities. *Jurnal Pustaka Aktiva (Pusat Akses Kajian Akuntansi, Manajemen, Investasi, Dan Valuta)*, 2(1), 29–36. <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakaaktiva.v2i1.179>
- Rianita, N. M. (2021). Sistem Penerapan Metode Pencatatan Dan Penilaian Persediaan Barang Dagang Di Togamas. *Jurnal Artha Satya Dharma*, 14(1), 65–74. <https://doi.org/10.55822/asd.v14i1.69>
- Rinaldy, E., Ikhlas, D., & Utama, A. (2021). *Perdagangan internasional: Konsep dan aplikasi*. Bumi Aksara.
- Roel, R., Sumual, F. M., & Bacilus, A. (2023). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang. *METHOSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 6(2), 146–159. <https://doi.org/10.46880/jsika.vol6no2.pp146-159>
- Sari, D. I. (2018). Analisis Perhitungan Persediaan dengan Metode FIFO dan Average Pada PT. Harapan. *PERSPEKTIF: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Akademi Bina Sarana Informatika*, 16(1), 31–38.
- Sonu, S. S., & Budiarmo, N. S. (2021). Penerapan Metode Persediaan Dalam Perencanaan Pajak. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 4(2), 49. <https://doi.org/10.32400/jiam.4.2.2020.34101>
- Suryani, L., & Ardaninggar, S. S. (2022). Penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) Perbankan Syariah Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1448–1454. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5295>
- Syamsuddin, F. R. (2023). Analisis Perbandingan Perhitungan Harga Pokok Penjualan dengan Persediaan Metode FIFO dan Average (Studi Kasus Pada UD. Sumber Makmur Kota Baubau). *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), 922–929. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i1.3667>
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2018). *Accounting Principles* (13th ed.). Wiley.